

## IDENTIFIKASI FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN PAJAK DAERAH

**Muhammad Tahwin**

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 'YPPI' Rembang

e-mail: tahwinm@yahoo.co.id

**Abstract : Identification of Factory that Affect local tax revenue.** This study had a purpose to analyze local tax income in rembang regency according to factors, which affected the income for the period of 1992-2008. The data used in this study are primary and secondary data. This study applied a multiple regression analysis. the results obtained by the study. Show that per capita income, number of tourists and c group mining product had a positive and significant effect to the tax income. Number of industries and hotel room reservation did not have significant effect to the tax income of rembang regency. Variable of per capita income gives the dominant influence to the local tax income rembang regency.

**keywords:** local tax income, Rembang Regency, number of tourist, c group mining

**Abstrak : Identifikasi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah.** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pendapatan pajak daerah di Kabupaten Rembang sesuai dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan untuk periode 1992-2008. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Ini studi menerapkan analisis regresi ganda. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa pendapatan per kapita, jumlah wisatawan dan c produk pertambangan kelompok memiliki dampak positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak. Jumlah industri dan hotel pemesanan kamar tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak kabupaten rembang. Variabel pendapatan per kapita memberikan pengaruh dominan terhadap lokal pajak penghasilan Kabupaten Rembang.

**Kata Kunci:** pendapatan pajak daerah, Kabupaten Rembang, jumlah wisatawan, galian C

### PENDAHULUAN

Berdasarkan pada UU No. 34 Tahun 2000 tentang Tentang Perubahan Pertama UU. No. 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah. Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang menerbitkan peraturan daerah yang mengatur tentang pajak daerah. Pajak Daerah yang berlaku di Kabupaten Rembang yaitu Pajak Hiburan, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengusahaan Sarang Burung Walet, Pajak Hotel, Pajak Restoran.

Kabupaten Rembang dilihat dari kemampuan merealisasikan target penerimaan pajak daerah secara rata-rata dari tahun 2003 -2007 adalah sebesar 102,88 % (Dispenda Kab. Rembang, 2003-2007). Hal ini menunjukkan apabila dilihat dari pencapaian target setiap tahunnya menunjukkan masih luasnya potensi yang ada, sehingga target tersebut relatif mudah tercapai. Oleh karena itu harus

dilakukan usaha-usaha untuk menggali potensi yang ada sehingga dapat ditentukan target yang lebih realistis dan menunjukkan potensi yang sebenarnya (Cahyono, 2005). Untuk menentukan target yang realistis maka harus diketahui terlebih dahulu faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penerimaan pajak.

Diantara sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), pertumbuhan penerimaan pajak daerah Kabupaten Rembang bisa dikatakan masuk dalam kategori rendah yaitu sebesar 10,86% (Dispenda Kab. Rembang, 2003-2007). Berdasar kondisi tersebut, permasalahan yang muncul adalah rendahnya pertumbuhan penerimaan pajak daerah Kabupaten Rembang. Sehingga pertanyaan dalam penelitian adalah mengapa penerimaan pajak daerah di Kabupaten Rembang rendah dan faktor-faktor apa yang mempengaruhinya. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah Kabupaten Rembang.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Pajak Daerah.**

Dalam ketentuan umum PP No. 65 Tahun 2001 pasal 1, pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan usaha pada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Secara administrasi daerah, pajak daerah dapat digolongkan menjadi pajak daerah tingkat propinsi dan pajak daerah tingkat kabupaten/ kota. Adapun kriteria yang harus dipenuhi suatu potensi pendapatan agar dapat menjadi obyek pengenaan pajak daerah yaitu (Davey, 1988): 1) Kecukupan dan elastisitas penerimaan dari suatu pajak harus menghasilkan penerimaan yang mampu membiayai biaya pelayanan yang akan dikeluarkan. 2) Pemerataan (Keadilan) prinsipnya adalah beban pengeluaran pemerintah daerah harus ditanggung oleh semua golongan dalam masyarakat sesuai dengan kesanggupannya. 3) Kemampuan/kelayakan administrasi berbagai jenis pajak di daerah sangat sangat berbeda-beda dalam jumlah, integritas dan keputusan yang diperlukan dalam administrasinya. 4) Kesepakatan politik keputusan pembebanan pajak sangat tergantung pada kepekaan masyarakat tentang pajak dan nilai-nilai yang berlaku di suatu daerah. 5) Distorsi terhadap perekonomian implikasi pajak yang secara minimal berpengaruh terhadap perekonomian.

### **Sistem Pemungutan Pajak Daerah.**

Pemungutan pajak daerah saat ini menggunakan tiga sistem pemungutan pajak (Siahaan, 2005), yaitu: 1) Dibayar sendiri oleh wajib pajak, sistem ini dilakukan dengan memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). 2) Ditetapkan oleh Kepala Daerah dalam sistem ini pajak dibayar oleh wajib pajak setelah terlebih dahulu ditetapkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk. 3) Dipungut oleh pemungut pajak dalam sistem ini pengenaan pajak dipungut oleh pemungut pajak pada sumbernya.

### **Jenis Pajak Daerah.**

Berdasarkan UU No. 34 Tahun 2000 maka pajak daerah di kabupaten/kota menjadi tujuh jenis yakni: pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian golongan C serta pajak parkir.

### **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah.**

Menurut Musgraves (1998) pendapatan telah diterima secara luas sebagai ukuran untuk menentukan kemampuan membayar pajak. Demikian juga Mangkoesoebroto (2001) menegaskan bahwa ukuran yang umum untuk mengukur kemampuan seseorang membayar pajak adalah pendapatan. Adapun Sriyana (1999) menekankan bahwa besar kecilnya penerimaan pajak akan sangat ditentukan oleh pendapatan perkapita, jumlah penduduk dan kebijakan pemerintah, baik pusat maupun daerah. Wantara (1997) juga mengemukakan bahwa besar kecilnya penerimaan disektor pajak juga dipengaruhi oleh laju wisatawan asing dan domestik. Selanjutnya Prakoso (2005) menambahkan bahwa dalam pemungutan pajak maka jumlah subjek dan objek pajak akan mempengaruhi penerimaan pajak dari hasil pungutan tersebut. Berdasar pada uraian diatas, apabila diterapkan dalam konteks pajak daerah di kabupaten Rembang akan terlihat faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penerimaan masing-masing jenis pajak tersebut.

Salah satu dasar pengenaan pajak hotel adalah pembayaran yang dilakukan oleh tamu yang menginap. Tamu yang menginap pembayarannya didasarkan pada kamar yang disewa. Dari pembayaran yang dilakukan, maka dasar pengenaan pajaknya dapat didekati dengan besarnya tingkat hunian kamar. Sehingga secara spesifik faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak hotel adalah tingkat hunian kamar hotel.

Pajak restoran subjeknya dapat dilihat dari konsumen restoran. Sebagian besar konsumen restoran adalah masyarakat berpendapatan menengah keatas yang potensinya dapat dilihat dari pendapatan per kapita. Jadi secara spesifik faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak restoran adalah pendapatan perkapita.

Pajak hiburan subjeknya dapat dilihat dari jumlah penonton yang menonton (menikmati)

hiburan. Sementara itu salah satu motif wisatawan melakukan perjalanan wisata adalah untuk menikmati hiburan yang ada dalam obyek wisata. Adapun hiburan dalam obyek wisata sendiri dikenakan pungutan pajak. Berdasar hal tersebut, subjek pajak hiburan dapat didekati dari jumlah pengunjung obyek wisata. Jadi secara spesifik faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak hiburan adalah jumlah pengunjung obyek wisata.

Mengacu pada PP. No. 65 Tahun 2001 pajak reklame dikenakan atas penyelenggaraan reklame. Minat untuk memasang reklame ditentukan oleh seberapa besar kepentingan orang atau badan usaha untuk memperkenalkan produk barang atau jasa, dalam hal ini adalah produsen (industri). Sehingga produsen adalah merupakan subjek pajak. Ini berarti dasar pengenaan pajak reklame dapat didekati dengan seberapa banyak produsen (industri) yang ada walaupun tidak semua produsen tersebut memasang reklame. Jadi secara spesifik faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak reklame adalah jumlah industri.

Mengacu pada PP. No. 65 Tahun 2001 wajib pajak dari pajak penerangan jalan adalah orang pribadi atau badan yang menjadi pelanggan listrik dan atau pengguna tenaga listrik. Dasar pengenaan pajaknya adalah nilai jual tenaga listrik yang dipakai. Berdasar pada hal tersebut maka potensi pajaknya adalah pelanggan listrik. Ini berarti secara spesifik faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak penerangan jalan adalah jumlah pelanggan listrik.

Berdasar PP. No. 65 Tahun 2001 pajak pengambilan bahan galian golongan C di kenakan atas kegiatan pengambilan bahan galian golongan C. Pengenaan pajaknya didasarkan pada nilai jual hasil pengambilan bahan galian golongan C. Jadi faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak pengambilan galian golongan C adalah hasil produksi bahan galian golongan C. Berdasar pada uraian tersebut maka secara spesifik faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak pengambilan bahan galian golongan C adalah hasil produksi bahan galian golongan C.

Pajak perusahaan sarang burung walet didasarkan pada Perda Kab. Rembang No. 21 Tahun 2001. Sehingga kurang relevan apabila memasukkan variabel hasil produksi usaha sarang burung walet dalam penelitian, karena data *time series* akan diambil mulai tahun 1990-2008.

Penelitian terdahulu yang digunakan sebagai dasar kajian pembandingan dalam penelitian ini antara lain: penelitian yang dilakukan Agus Wantara (1999) tentang Pajak Daerah menemukan bahwa jumlah kendaraan bermotor, jumlah wisatawan berpengaruh signifikan pada penerimaan pajak daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun inflasi dan pendapatan perkapita mempunyai pengaruh yang tidak signifikan pada penerimaan pajak daerah. Sementara itu hasil penelitian yang dilakukan Sutrisno (2002) menunjukkan bahwa pendapatan perkapita, jumlah wisatawan, jumlah penduduk, jumlah pelanggan listrik, jumlah petugas pajak merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah di Kabupaten Semarang.

Penelitian Veronika Winarti Agustiningtyas (2003) juga melakukan analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah kabupaten dan kota di Propinsi Jawa Tengah. Kesimpulan yang diperoleh adalah bahwa pendapatan perkapita, jumlah wisatawan, investasi pemerintah dan daya listrik tersambung berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak. Selanjutnya Muhammad Masrofi (2004) melakukan penelitian terhadap potensi dan melakukan analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak dan retribusi daerah. Kesimpulan penelitiannya adalah bahwa variabel PDRB riil, jumlah penduduk mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah.

Dasar penyusunan model dalam penelitian ini mengacu pada model penelitian yang dilakukan oleh Sutrisno (2002). Perbedaan penelitian yang peneliti lakukan dengan penelitian terdahulu adalah adanya variabel baru yaitu tingkat hunian kamar hotel, hasil produksi bahan galian golongan C dan daerah penelitian yaitu Kabupaten Rembang. Adapun persamaannya dengan penelitian terdahulu adalah menyoroti penerimaan pajak daerah.

## **METODE PENELITIAN**

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisa statistik *multivariate* yaitu regresi berganda. Untuk menggambarkan pengaruh variabel-variabel dalam penelitian ini maka model persamaannya adalah:

$$PPD = \beta_0 + \beta_1 THK + \beta_2 PEP + \beta_3 JPOB + \beta_4 JIND + \beta_5 JPL + \beta_6 HPGC + \mu_1 \dots (1)$$

Dimana :

PPD = penerimaan pajak daerah

$\beta_0$  = intersep

$\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_6$  = parameter regresi

THK = tingkat hunian kamar hotel.

PEP = pendapatan per kapita

JPOB = jumlah pengunjung obyek wisata

JIND = jumlah industri

JPL = jumlah pelanggan listrik

HPGC = hasil produksi bahan galian golongan C

$\mu_1$  = *error terms* (kesalahan pengganggu)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

Sebelum melakukan interpretasi terhadap hasil regresi, terlebih dahulu dilakukan pengujian terhadap asumsi–asumsi klasik model OLS. Pengujian ini untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi pada hasil estimasi.

Pengujian terhadap ada tidaknya multikolinieritas dalam penelitian ini dilakukan dengan melihat nilai tolerance dan *variance inflation factor* (VIF). Hasil pengujian menunjukkan besarnya nilai *variance inflation factor* adalah 19,840 pada variabel jumlah pelanggan listrik. Adapun untuk uji autokorelasi dilakukan dengan menggunakan *Run Test*. Hasil pengujian menunjukkan nilai probabilitas signifikan sebesar 0,605 lebih besar dari  $\alpha$  (0,05). Hal ini berarti bahwa residual adalah random atau tidak terjadi autokorelasi. Selanjutnya pengujian heteroskedastisitas dilakukan dengan *Uji Park*. Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai probabilitas signifikansi semua variabel independen di atas 5% (0,05). Hal ini berarti bahwa dalam model regresi tidak terdapat heteroskedastisitas.

Berdasar pada pengujian asumsi klasik yang telah dilakukan, pada model terdapat masalah multikolinieritas pada variabel jumlah pelanggan listrik. Untuk memperbaiki model dilakukan dengan mengeluarkan variabel jumlah pelanggan listrik dari model penelitian.

Hasil pengujian setelah variabel jumlah pelanggan listrik (JPL) dikeluarkan dari model adalah sebagaimana pada Tabel 1.

**Tabel 1**  
**Ringkasan Hasil Regresi**  
**(Variabel Jumlah Pelanggan Listrik Dikeluarkan Dari Model)**

Variabel	Koefisien	t	Sig.	Keterangan
(Constant)	-1796,132	-1,451	0,175	
PEP	1188,710	4,847	0,001	Signifikan
JPOB	6,445E-03	3,028	0,011	Signifikan
JIND	0,510	0,040	0,969	Tidak signifikan
THK	4,271	0,072	0,944	Tidak signifikan
HPGC	4,354E-03	3,447	0,005	signifikan
Durbin –Watson	Adjusted R Square	F	(prob. Sig)	
2,130	0,958	73,868	(0,000)	

Sumber: data sekunder, diolah.

Hasil uji asumsi klasik model setelah dikeluarkannya variabel jumlah pelanggan listrik menunjukkan bahwa model terbebas dari penyimpangan asumsi klasik. Berdasarkan hal tersebut, model tersebut dipilih sebagai *best fit model*.

Uji signifikansi F merupakan uji ketepatan model untuk menguji apakah variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen. Uji F dilakukan dengan membandingkan nilai F hitung dengan nilai F tabel. Nilai F statistik sebesar 73,868 lebih besar dari nilai F tabel sebesar

3,20, yang berarti semua variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu penerimaan pajak daerah (PPD).

Nilai  $R^2$  statistik mengukur tingkat keberhasilan model yang digunakan dalam memprediksi nilai variabel dependen. Besarnya nilai  $R^2$  adalah *adjusted R<sup>2</sup>* sebesar 0,958. Hal ini dapat diartikan bahwa 95,8% variasi variabel dependen mampu dijelaskan oleh variabel independen di dalam model. Sisanya sebesar 4,2% dijelaskan oleh variabel-variabel lainnya diluar model.

Uji statistik t (*t-test*) bertujuan untuk mengetahui signifikansi pengaruh variabel independen secara individual terhadap variabel dependen. Dilihat dari nilai statistik t hitung dan nilai statistik t tabel (untuk  $\alpha = 5\%$ , dengan  $df = 11$  pada uji satu sisi sebesar 1,796), maka variabel pendapatan per kapita (PEP), jumlah pengunjung obyek wisata (JPOB) dan hasil produksi bahan galian golongan C (HPGC) berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah (PPD)

$$PPD = -1796,132 + 1188,710 PEP + 0,006 JPOB + 0,510 JIND + 4,271 THK + 0,004 HPGC. \dots\dots(2)$$

$$t \quad (-1,451) \quad (4,847) \quad (3,028) \quad (0,040) \quad (0,072) \quad (3,447)$$

$$R^2 = 0,958$$

Dari *best fit model* tersebut dapat dijelaskan bahwa koefisien parameter pendapatan perkapita (PEP) sebesar 1.188,710. Nilai ini berarti apabila tingkat pendapatan per kapita masyarakat Kabupaten Rembang meningkat Rp. 1.000.000,00, maka akan meningkatkan penerimaan pajak daerah Kabupaten Rembang sebesar Rp. 1.188.710.000,00 dengan asumsi variabel independen yang lain tetap. Salah satu ukuran dari tingkat kesejahteraan masyarakat adalah pendapatan per kapita yang diprosikan dari PDRB per kapita. Semakin besar pendapatan masyarakat akan menyebabkan kemampuan membayar pajak masyarakat menjadi semakin besar sehingga penerimaan pajak akan naik. Hal ini sesuai dengan teori perpajakan bahwa penerimaan pajak akan sangat ditentukan oleh pendapatan per kapita (Musgraves, 1998). Pada penelitian ini juga sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Muhammad Masrofi (2004) bahwa pendapatan per kapita berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak daerah Kota Semarang. Besarnya pendapatan per kapita Kabupaten Rembang dari tahun 2004-2008 terus mengalami kenaikan. Dari data tersebut menunjukkan bahwa kenaikan pendapatan per kapita searah dengan kenaikan penerimaan pajak daerah dalam periode yang sama. Peningkatan pendapatan per kapita berarti kegiatan sektor-sektor dalam perekonomian mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut akan dapat berdampak terjadinya peningkatan penerimaan pajak daerah.

Jumlah pengunjung obyek wisata (JPOB) mempunyai koefisien parameter sebesar 0,006. Ini memberikan arti bahwa setiap kenaikan pengunjung obyek wisata sebanyak 1 (satu) orang akan menyebabkan peningkatan penerimaan pajak daerah

Kabupaten Rembang. Untuk variabel jumlah industri (JIND) dan tingkat hunian kamar hotel (THK) mempunyai pengaruh yang positif tetapi tidak signifikan terhadap penerimaan pajak daerah (PPD) Kabupaten Rembang.

### Pembahasan

Berdasar pada hasil perhitungan analisis regresi maka *best fit model* adalah:

Kabupaten Rembang sebesar Rp. 6.000,00 dengan asumsi variabel independen yang lain tetap. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Sutrisno (2002) di Kabupaten Semarang, bahwa jumlah wisatawan merupakan faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah. Wisatawan baik domestik maupun yang berasal dari mancanegara senantiasa akan membelanjakan sebagian atau seluruh uang yang dibawa untuk keperluan akomodasi dan membeli cinderamata. Semakin banyak wisatawan yang berkunjung ke daerah maka semakin banyak uang yang beredar di daerah sekitar obyek wisata. Kondisi ini akan mendorong timbulnya kegiatan ekonomi di daerah sekitar obyek wisata untuk melayani kebutuhan wisatawan. Dengan semakin besarnya kegiatan ekonomi, maka pajak yang dapat dipungutpun menjadi semakin besar. Realitas di Kabupaten Rembang pada tahun 2007 pengunjung obyek wisata mengalami penurunan dibanding tahun 2006. Penurunan jumlah pengunjung obyek wisata tersebut ternyata searah dengan menurunnya penerimaan pajak hiburan pada tahun 2007. Salah satu faktor penyebab penurunan tersebut adalah sedikitnya event-event ataupun hiburan yang dilaksanakan di dalam area obyek wisata. Di sisi lain sebagian besar pengunjung obyek wisata di Kabupaten Rembang adalah masyarakat Rembang sendiri. Sedikitnya event atau hiburan yang dilaksanakan di area obyek wisata menurunkan motivasi untuk berkunjung.

Besarnya koefisien parameter untuk jumlah industri (JIND) adalah 0,510. Hal ini menunjukkan bahwa apabila jumlah industri di Kabupaten Rembang bertambah sebanyak 1 unit akan menyebabkan peningkatan penerimaan pajak daerah

sebesar Rp. 510.000,00 dengan asumsi variabel independen yang lain tetap. Untuk jumlah industri apabila dilihat dari signifikansinya, bukan merupakan variabel yang signifikan mempengaruhi penerimaan pajak daerah. Kondisi yang demikian bisa dimengerti karena untuk industri-industri tidak dikenakan pajak daerah secara langsung. Keberadaan suatu industri pada saat ijin pendirian usaha dan ijin tempat atau lokasi usaha (HO) tidak dikenakan pajak daerah. Pajak yang dipungut dari suatu industri adalah merupakan pajak pusat yang mencakup pajak penghasilan (PPH), pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak bumi dan bangunan (PBB). Dalam penelitian ini keberadaan industri dilihat dari sisi pemungutan pajak reklame yang akan berdampak terhadap penerimaan pajak daerah. Hal ini disebabkan karena dalam rangka memperkenalkan produknya maka industri-industri tersebut akan mempergunakan media reklame. Berangkat dari hal tersebut, pengaruh jumlah industri yang tidak signifikan terhadap penerimaan pajak daerah ini lebih disebabkan karena tidak semua produsen (industri) tersebut memasang reklame. Pemasangan reklame di Kabupaten Rembang lebih didominasi oleh perusahaan atau industri yang berasal dari luar wilayah Kabupaten Rembang yaitu perusahaan rokok dan perusahaan jasa komunikasi.

Tingkat hunian kamar hotel (THK) mempunyai koefisien parameter sebesar 4,271. Hal ini memberikan arti bahwa setiap kenaikan tingkat hunian kamar hotel sebesar 1% (satu persen) akan menyebabkan peningkatan penerimaan pajak daerah sebesar Rp. 4.271.000,00 dengan asumsi variabel independen yang lain tetap. Berkaitan dengan tingkat hunian kamar hotel, Jamli (1997) menegaskan bahwa semakin tinggi tingkat hunian kamar hotel memberikan gambaran semakin besar potensi pariwisata daerah. Kondisi tersebut pada akhirnya akan memperbesar potensi pajak daerah yang dapat dipungut dari kegiatan pada sektor perhotelan. Sementara itu pendirian hotel di daerah pada umumnya dilakukan oleh swasta. Hotel yang berdiri baik kelas melati maupun berbintang senantiasa dilandasi oleh peluang pasar yang ada atau didasarkan oleh permintaan pasar penginapan. Semakin besar atau banyak wisatawan yang berkunjung ke daerah maka permintaan tempat penginapan semakin besar. Industri hotel cenderung berada pada kota-kota besar di mana sektor jasa telah

berkembang. Pada daerah dengan sektor utama pertanian, industri perhotelan kurang berkembang baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Kabupaten Rembang sendiri untuk perekonomiannya masih didominasi sektor pertanian. Jumlah hotel yang ada di Kabupaten Rembang relatif kecil dengan kualifikasi semuanya adalah hotel kelas melati. Sehingga dapat dipahami apabila tingkat hunian kamar hotel kurang berperan dalam penerimaan pemerintah dari sektor pajak daerah.

Hasil produksi bahan galian golongan C (HPGC) mempunyai koefisien parameter sebesar 0,004. Hal ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan hasil produksi bahan galian golongan C sebesar 1 M<sup>3</sup>, akan meningkatkan penerimaan pajak daerah Kabupaten Rembang sebesar Rp. 4.000,00 dengan asumsi variabel independen yang lain tetap. Adapun secara empiris penerimaan pajak daerah juga dipengaruhi oleh hasil produksi bahan galian golongan C. Hal ini sesuai dengan harapan yang ada dalam teori. Secara teori pengenaan pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C didasarkan pada nilai jual hasil pengambilan bahan galian golongan C. Nilai jual sendiri dihitung dengan cara mengalikan volume hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar bahan galian golongan C. Di samping itu realitas juga menunjukkan bahwa kontribusi pajak pengambilan bahan galian golongan C terhadap penerimaan pajak daerah Kabupaten Rembang selama tahun 2004-2008 secara rata-rata mencapai 29,16%.

Dari kelima variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa pendapatan per kapita (PEP) merupakan variabel independen yang mempunyai nilai koefisien parameter yang terbesar. Hal ini mengindikasikan bahwa pendapatan per kapita masyarakat Kabupaten Rembang relatif lebih berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Berdasarkan hasil analisis atas data dan pembahasan, maka diperoleh kesimpulan faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah Kabupaten Rembang secara signifikan adalah pendapatan per kapita, jumlah pengunjung obyek wisata dan hasil produksi bahan galian golongan C. Adapun jumlah industri dan tingkat hunian kamar

hotel tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak daerah Kabupaten Rembang. Variabel pendapatan per kapita merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah Kabupaten Rembang. Hal ini terlihat dari nilai koefisien parameter variabel pendapatan per kapita merupakan yang terbesar diantara semua variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini.

### Saran

Penerimaan pajak daerah Kabupaten Rembang relatif masih rendah. Usaha peningkatan penerimaan pajak daerah dapat dilakukan dengan pengembangan ekonomi daerah yang berbasis pada kekuatan lokal untuk pengembangan komoditas unggulan. Berkembangnya perekonomian akan berdampak pada peningkatan pendapatan per kapita masyarakat, sehingga kemampuan masyarakat dalam membayar pajak daerah semakin meningkat. Usaha lain yang dapat dilakukan untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah Kabupaten Rembang adalah dengan mengembangkan sektor pariwisata. Pengembangan tersebut baik secara fisik maupun non fisik terhadap obyek wisata yang mencakup sarana dan prasarana, manajemen pengelolaan obyek wisata serta kualitas layanan terhadap wisatawan. Berkembangnya sektor pariwisata akan meningkatkan jumlah kunjungan wisata. Kondisi ini akan mendorong timbulnya kegiatan ekonomi didaerah sekitar obyek wisata. Semakin besar kegiatan ekonomi, maka pajak yang dapat dipungutpun menjadi semakin besar. Selain itu, usaha lain yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah adalah dengan peningkatan kegiatan pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta peningkatan promosi dan pengembangan potensi bahan galian C yang belum tergarap. Kegiatan tersebut secara otomatis akan meningkatkan hasil produksi bahan galian golongan C yang selanjutnya akan meningkatkan penerimaan pajak daerah terutama dari sektor pajak pengambilan bahan galian golongan C.

### REFERENSI

Agustiningtyas, Veronika Winarti. 2003. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan

Pajak Daerah Kabupaten dan Kota di Propinsi Jawa Tengah (tahun 1998-2001). *Thesis* (tidak dipublikasikan). Semarang: Program Pasca Sarjana MIESP UNDIP.

Badan Pusat Statistik. Jawa Tengah Dalam Angka 1992-2008, Propinsi Jawa Tengah.

Badan Pusat Statistik. Rembang Dalam Angka 2000-2001, Kabupaten Rembang.

Cahyono, Budi. 2005. Analisis Potensi Sumber-Sumber Pendapatan Asli daerah (PAD) Kabupaten Grobogan. *Jurnal Riset Bisnis Indonesia*. Vol. 1 (2) Juli 2005. Semarang: Unissula.

Davey, K. J. 1988. *Pembiayaan Pemerintah Daerah*, penerjemah Amanullah, dkk. Jakarta: UI Press.

Devas, Nick. Brian Binder. Anne Booth. Kenneth Davey. Roy Kelly. 1989. *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*. Penerjemah Masri Maris. Jakarta: UI Press.

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Rembang. *Data Target dan Realisasi Pajak Daerah, 2000-2007*.

Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang. 2009. *Evaluasi Produksi Bahan Galian Golongan C Kab. Rembang*.

Ghozali, Imam. 2007. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Undip.

Gujarati, Damodar. 2003. *Basic Econometrics*. Fourth edition. The Mc Graw Hill.

Jamli, Ahmad dan Astuti Rahayu. 1997. Analisis Pajak Pembangunan I Perhotelan Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Studi Kasus : Kotamadya Yogyakarta. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Vol. 2 No. 3. Yogyakarta.

Kanzunnudin, Mohammad. 2005. Keterkaitan Pengembangan Pariwisata Dengan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat. *Jurnal Gemawisata*. Vol. 3 No. 3. Semarang: STIEPARI.

Kurniawan, Panca. Agus Purwanto. 2006. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Indonesia*. Malang: Bayumedia Publishing.

Mangkoesobroto, Guritno. 2001. *Ekonomi Publik*. Yogyakarta BPFE.

Masrofi, Muhammad. 2004. Potensi dan Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah (Studi Kasus di Kota Semarang). *Thesis* (tidak dipublikasikan). Semarang: Program Pasca Sarjana MIESP UNDIP.

Musgraves, R. A dan P. B. Musgraves. 1998. *Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Erlangga, PT. Gelora Aksara Pratama.

- Pemerintah Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 Tentang Perubahan Pertama UU. No. 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah.
- \_\_\_\_\_, Peraturan Pemerintah No 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Prakoso, Kesit Bambang. 2005. Pajak dan Retribusi Daerah. Yogyakarta: UII Press.
- Rosyidi, Imron dan Mohammad Kanzunudin. 2002. Pengaruh Atraksi Seni Budaya Terhadap Jumlah Kunjungan Wisatawan Di Obyek Wisata Gunungrowo Kabupaten Pati. Jurnal Gemawisata. Vol. 1 No. 1. Semarang: STIEPARI.
- Siahaan, Marihot P. 2005. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soeratno dan Suparmono. 2002. Urgensi Pajak Daerah dan Penghasilan Daerah Dalam Struktur Pendapatan Asli Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Jurnal Akuntansi dan Manajemen. Agustus. 2002. Yogyakarta. STIE YKPN.
- Sriyana, Jaka. 1999. Hubungan Keuangan Pusat - Daerah, Reformasi Perpajakan dan Kemandirian Pembiayaan Pembangunan Daerah. JEP. Vol.4 No.1.
- Sutrisno. 2002. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah (Studi Kasus di Kabupaten Semarang). Thesis (tidak dipublikasikan). Semarang: Program Pasca Sarjana MIESP UNDIP.
- Wantara, Agus. 1997. Analisis Pendapatan Asli Daerah dan Bantuan Pemerintah Pusat di DIY (1970-1992), Kinerja-Jurnal Bisnis dan Ekonomi No. 2/Januari, 1997. Yogyakarta: Program Pasca Sarjana Universitas Atmajaya.